

Pengaruh pengungkapan ESG pilar sosial dan tata kelola terhadap agresivitas pajak: studi empiris pada konstituen top 10 IDX ESG leaders

Diena Saraswaty¹, Melania Trias Lazuardi², Aiga Regina³, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol⁴

^{1,2,3,4}Perbanas Institute, Indonesia

¹diana_chan@yahoo.com, ²lazuardimelania@gmail.com, ³aigargn@gmail.com, ⁴profperbanas@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 30 Mei 2026

Disetujui 18 Juni 2026

Diterbitkan 06 Juli 2026

Kata kunci:

ESG; Pilar Sosial; Tata Kelola; Agresivitas Pajak; ETR.

Keywords:

ESG; Social Pillar; Governance; Tax Aggressiveness; ETR.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menguji pengaruh pengungkapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) khususnya pilar sosial dan tata kelola terhadap agresivitas pajak korporasi. Objek penelitian adalah emiten yang termasuk Top 10 IDX ESG Leaders periode 2023–2025, dengan agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel kontrol meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA), dan *dummy* sektor. Penelitian menggunakan metode kuantitatif berbasis data panel dengan 27 observasi yang dianalisis melalui regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan pilar tata kelola berpengaruh positif terhadap ETR, yang berarti berkorelasi negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, pengungkapan pilar sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, seluruh variabel kontrol juga tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan, seluruh variabel independen dan kontrol berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola internal dalam mendorong kepatuhan pajak serta memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan prinsip ESG dengan kebijakan perpajakan pada perusahaan berkinerja ESG unggul di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosures specifically the social and governance pillars on corporate tax aggressiveness. The research subjects are issuers included in the Top 10 IDX ESG Leaders for the 2023–2025 period, with tax aggressiveness measured using the Effective Tax Rate (ETR). Control variables include firm size, profitability (ROA), and sector dummies. The study employs a quantitative method based on panel data, with 27 observations analyzed via multiple linear regression. The results indicate that disclosure of the governance pillar has a positive effect on the ETR, implying a negative correlation with corporate tax aggressiveness companies with good governance tend to be more compliant with their tax obligations. Conversely, disclosure of the social pillar does not have a significant effect on tax aggressiveness. Partially, none of the control variables had a significant effect. However, simultaneously, all independent and control variables had a significant effect on tax aggressiveness. This study underscores the importance of internal governance in promoting tax compliance and provides empirical evidence regarding the relationship between ESG principles and tax policies in companies with superior ESG performance in Indonesia.



©2026 Diena Saraswaty, Melania Trias Lazuardi, Aiga Regina, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sebagai pilar fundamental bagi pendapatan domestik, pajak memegang andil vital dalam mendanai proyek pembangunan nasional serta roda tata kelola pemerintahan. Konstitusionalitas instrumen fiskal ini dalam tata keuangan negara tertuang secara eksplisit melalui Pasal 23A UUD 1945, yang memandatkan bahwa segala bentuk pungutan wajib berskala nasional yang mengikat harus dilandasi oleh regulasi setingkat undang-undang. Guna mengeskalasi efisiensi sistem perpajakan sekaligus mendongkrak pendapatan kas negara, otoritas eksekutif mengundang UU Nomor 7 Tahun 2021 perihal Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati serangkaian restrukturisasi kebijakan fiskal telah dijalankan, optimalisasi pemungutan pajak tetap menjadi problematika tersendiri bagi pemerintah. Berdasarkan dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak, pencapaian *tax ratio* nasional berada di angka 10,07% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Wibawa, 2025). Realisasi ini

mengindikasikan bahwa kapasitas pemungutan kontribusi wajib masih memerlukan akselerasi yang signifikan, mengingat kedudukan strategis pajak selaku instrumen utama pembiayaan pembangunan negara.

Perilaku agresivitas pajak yang dipraktikkan oleh sektor korporasi menjadi salah satu determinan yang memengaruhi optimalisasi penerimaan kas negara dari sektor fiskal. Merujuk pada pemikiran Frank et al (2009), agresivitas perpajakan direpresentasikan sebagai langkah entitas bisnis demi meminimalkan beban pajak mereka secara riil melalui restrukturisasi perencanaan pajak. Tindakan ini mencakup skema perpajakan yang legal maupun pemanfaatan celah regulasi (*loopholes*) yang tersedia dalam korporasi (Frank et al., 2009). Sementara itu, Hanlon & Heitzman (2010) mengonseptualisasikan agresivitas pajak sebagai seluruh spektrum aktivitas korporasi yang berorientasi pada reduksi kewajiban pajak secara sengaja. Fenomena ini mendapat perhatian krusial lantaran berisiko mendegradasi pendapatan negara yang seyogianya dialokasikan bagi akselerasi pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan publik.

Secara teoritis, manifestasi agresivitas pajak dapat dibedah menggunakan pendekatan Teori Agensi (*Agency Theory*) yang diinisiasi oleh Jensen & Meckling (2019). Teori ini memproksikan bahwa interaksi kontraktual antara pemegang saham selaku *principal* dan pihak manajemen selaku *agent* rentan memicu friksi kepentingan. Polarisasi ini dipicu oleh adanya perbedaan orientasi tujuan serta asimetri informasi di antara kedua belah pihak (Jensen & Meckling, 2019). Akibat akses informasi internal yang lebih superior, manajemen memiliki peluang untuk bertindak oportunistik demi merealisasikan kepentingannya sendiri, termasuk melalui kebijakan penghematan pajak yang agresif guna mendongkrak profitabilitas korporasi. Kendati demikian, manuver tersebut membawa konsekuensi logis berupa peningkatan eksposur risiko pemeriksaan pajak, sanksi administratif, hingga potensi kerusakan reputasi yang merugikan pemegang saham dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, implementasi mekanisme pengawasan yang komprehensif melalui tata kelola perusahaan yang solid mutlak diperlukan guna memitigasi konflik keagenan sekaligus mereduksi kecenderungan tindakan oportunistik dari pihak manajemen.

Akselerasi atensi terhadap tata kelola bisnis berkelanjutan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan adopsi konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menilik argumentasi Elkington & Rowland (1999), performa suatu entitas bisnis tidak lagi terbatas pada parameter pencapaian laba finansial (*profit*) semata, melainkan wajib mencakup kontribusi nyata terhadap aspek kemanusiaan (*people*) serta kelestarian ekologis (*planet*) (Elkington & Rowlands, 1999). Atas dasar tersebut, metrik ESG bertransformasi menjadi salah satu instrumen krusial bagi investor maupun pemangku kepentingan untuk menakar keandalan kontinuitas usaha korporasi. Di yurisdiksi Indonesia, implementasi prinsip berkelanjutan ini memperoleh legitimasi yuridis lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini mewajibkan institusi jasa keuangan, emiten, beserta perusahaan publik untuk memublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) demi menegakkan pilar akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Di samping pembedahan lewat pendekatan *Agency Theory*, interelasi antara implementasi ESG dan kebijakan fiskal korporasi dapat ditinjau melalui kerangka *Stakeholder Theory* yang dipelopori oleh Freeman & McVea (2005). Teori ini menggarisbawahi bahwa tanggung jawab korporasi tidak sekadar berpusat pada kepentingan pemilik modal (*shareholders*), melainkan meluas ke seluruh spektrum pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi karyawan, konsumen, penyuplai, kreditor, otoritas pemerintah, komunitas lokal, hingga ekosistem lingkungan (Freeman & McVea, 2005). Dengan demikian, eksistensi jangka panjang perusahaan ditentukan oleh kapabilitasnya dalam merealisasikan ekspektasi dari segenap elemen tersebut. Dalam bingkai *Stakeholder Theory*, entitas bisnis didorong untuk mengkreasi nilai tambah yang mencakup dimensi sosial di samping target ekonomi. Konsekuensinya, perusahaan dengan keberpihakan kuat pada pilar sosial dan tata kelola yang baik cenderung memanifestasikan operasional bisnis yang lebih beretika, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, praktik agresivitas pajak berisiko memicu sentimen negatif dari *stakeholders* karena dinilai mereduksi kontribusi finansial perusahaan terhadap kesejahteraan publik. Oleh sebab itu, pengintegrasian prinsip ESG dapat direpresentasikan sebagai wujud konkret pertanggungjawaban korporasi terhadap pemangku kepentingan, sekaligus strategi preventif untuk mengamankan legitimasi dan dukungan demi keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Keterkaitan antara transparansi *disclosure* ESG dengan kebijakan agresivitas pajak korporasi juga dapat dianalisis dengan memanfaatkan pisau analisis *Legitimacy Theory* yang diintroduksi oleh Dowling & Pfeffer (1975). Konsep legitimasi ini menggarisbawahi bahwa korporasi senantiasa berupaya mengamankan dan mempertahankan pengakuan sosial dari publik. Langkah tersebut diakomodasi melalui pelaksanaan aktivitas operasional yang selaras dengan nilai, norma, serta ekspektasi yang berkembang di lingkungan sosial. Eksistensi jangka panjang suatu entitas bisnis tidak semata-mata diukur dari kapabilitasnya dalam mendulang laba finansial, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat akseptabilitas publik terhadap eksistensi korporasi tersebut (Dowling & Pfeffer, 1975). Dalam ranah fiskal, pemenuhan kewajiban perpajakan merepresentasikan wujud konkret kontribusi finansial perusahaan kepada negara demi kemaslahatan masyarakat luas. Oleh sebab itu, entitas bisnis yang memiliki dedikasi kuat terhadap implementasi tanggung jawab sosial serta tata kelola yang kredibel cenderung menjauhkan diri dari strategi agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan manuver penghindaran pajak yang ekstrem berisiko melahirkan sentimen publik yang negatif, yang pada gilirannya dapat mendegradasi legitimasi sosial yang telah dibangun oleh perusahaan (Ghozali & Chariri, 2022).

Fokus operasional riset ini diarahkan pada dua dimensi utama ESG, yakni pilar sosial (*social*) dan tata kelola (*governance*). Dimensi sosial merepresentasikan bentuk tanggung jawab entitas bisnis terhadap hak-hak pekerja, konsumen, komunitas lokal, serta elemen pemangku kepentingan eksternal lainnya. Mengacu pada asumsi *stakeholder theory*, perusahaan dengan tingkat transparansi sosial yang tinggi memiliki kecenderungan untuk memelihara hubungan harmonis dengan lingkungan sekitarnya melalui perbuatan yang beretika, termasuk dalam hal ketaatan membayar pajak. Di samping itu, jika ditinjau dari perspektif *legitimacy theory*, pengungkapan aspek sosial berfungsi sebagai instrumen strategis korporasi demi meraih dan mempertahankan akseptabilitas serta pengakuan dari publik. Dengan demikian, perusahaan yang gencar memublikasikan performa sosialnya diestimasikan memiliki intensitas yang lebih rendah dalam mengeksekusi kebijakan agresivitas perpajakan. Sementara itu, pilar tata kelola merefleksikan tingkat efektivitas monitoring, transparansi informasional, akuntabilitas publik, beserta reliabilitas sistem pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan premis *agency theory*, kualitas tata kelola yang solid bertindak sebagai peranti pengawasan terpadu yang mampu mereduksi asimetri dan friksi keagenan melalui pembatasan tindakan oportunistik dari pihak manajemen, termasuk di dalamnya kebijakan agresivitas pajak.

Dinamika perkembangan ESG di yurisdiksi Indonesia ditandai oleh peluncuran *IDX ESG Leaders* oleh Bursa Efek Indonesia, sebuah indeks pasar modal yang mengompilasi emiten-emiten dengan performa ESG superior berdasarkan evaluasi dari *Sustainalytics*. Konstituen yang berhasil menembus kategori *Top 10 IDX ESG Leaders* diindikasikan memiliki tingkat dedikasi yang tinggi terhadap keberlanjutan bisnis, tanggung jawab sosial, serta tata kelola organisasional yang kredibel. Kendati demikian, tingginya transparansi disklosur ESG tidak secara otomatis menjamin rendahnya kecenderungan korporasi dalam mempraktikkan penghindaran pajak yang agresif. Rangkaian literatur terdahulu mendokumentasikan konklusi yang divergen mengenai keterkaitan antara implementasi ESG dan agresivitas pajak, sehingga menyisakan celah inkonsistensi empiris yang memerlukan konfirmasi akademis lebih mendalam.

Berpijak pada urgensi optimalisasi pendapatan fiskal negara, eskalasi perhatian terhadap adopsi ESG di Indonesia, serta adanya polarisasi hasil riset terdahulu, studi ini diorientasikan untuk menguji secara empiris pengaruh pengungkapan ESG pilar sosial dan tata kelola terhadap tindakan agresivitas pajak pada emiten *Top 10 IDX ESG Leaders*. Eksplorasi ilmiah ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris yang valid mengenai signifikansi peran dimensi sosial dan tata kelola internal korporasi dalam mengintervensi kebijakan perpajakan perusahaan. Lebih jauh lagi, riset ini ditargetkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perluasan literatur akademis seputar relasi ESG dan agresivitas fiskal di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory menjabarkan keterkaitan antara owner sebagai prinsipal dan manajemen selaku agen. Jensen & Meckling (2019) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih pihak (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan atas nama prinsipal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 2019).

Manajemen sebagai agen bertanggung jawab atas kebijakan strategis dan pelaporan performa secara periodik, sementara disklosur ESG berfungsi memitigasi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan.

Konflik keagenan (*agency problem*) muncul akibat perbedaan orientasi antara manajemen dan kepentingan pemegang saham, yang dapat mendorong manajemen mengeksekusi kebijakan oportunistik, termasuk strategi pajak yang agresif demi mengeskalisasi laba bersih setelah pajak. Namun, agresivitas pajak yang tidak terkendali berisiko meningkatkan risiko hukum, *agency cost*, dan kerugian reputasional, sehingga mekanisme *monitoring* melalui *good corporate governance* diperlukan untuk mereduksi tindakan oportunistik tersebut.

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory yang diinisiasi Freeman (2005) menggarisbawahi bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya berpusat pada *shareholders*, melainkan meluas ke seluruh pemangku kepentingan tenaga kerja, pelanggan, kreditor, pemerintah, masyarakat, hingga lingkungan (Freeman & McVea, 2005). Perusahaan yang berdedikasi kuat pada dimensi sosial dan tata kelola cenderung mengadopsi operasional bisnis yang lebih bertanggung jawab, termasuk taat pada kewajiban perpajakan, karena agresivitas pajak berisiko memicu sentimen publik negatif akibat dipersepsikan mendegradasi kontribusi finansial riil perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Legitimacy Theory

Teori legitimasi menitikberatkan penyelarasan operasional korporasi dengan nilai dan norma sosial demi memperoleh pengakuan publik (Deegan, 2006). Diskrepansi antara nilai korporasi dan ekspektasi masyarakat menimbulkan *legitimacy gap* yang dapat mengancam *going concern* perusahaan (Ghozali & Chariri, 2022). Disklosur ESG khususnya pilar sosial dan tata kelola menjadi instrumen strategis untuk memitigasi *legitimacy gap* tersebut, sementara agresivitas pajak rentan menstimulasi sentimen negatif karena dinilai bertolak belakang dengan komitmen responsibilitas sosial korporasi.

ESG Pilar Sosial terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, perusahaan yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan secara luas terdorong berperilaku lebih etis, termasuk patuh terhadap kewajiban fiskal. *Legitimacy Theory* memperkuat argumen ini karena agresivitas pajak yang ekstrem berisiko merusak citra perusahaan yang telah membangun komitmen sosial. Lanis & Richardson (2012) mendokumentasikan bahwa korporasi dengan profil responsibilitas sosial tinggi lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak agresif karena mengkhawatirkan risiko reputasional (Lanis & Richardson, 2012). Temuan ini konsisten dengan hasil Gunadi et al. (2025) pada perusahaan terdaftar di Indonesia, yang menemukan bahwa performa ESG berasosiasi positif dengan *Effective Tax Rate* (ETR) mengindikasikan perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung kurang agresif dalam perpajakan (Gunadi et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut:

H1: Pengungkapan ESG Pilar Sosial berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

ESG Pilar Governance terhadap Agresivitas Pajak

Dari perspektif *Agency Theory*, tata kelola yang kredibel salah satunya proporsi direktur independen berfungsi sebagai instrumen *monitoring* yang mereduksi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Lanis & Richardson (2012) mengonfirmasi bahwa proporsi direktur independen berasosiasi negatif secara signifikan dengan agresivitas pajak karena meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen (Lanis & Richardson, 2012). Berdasarkan uraian tersebut:

H2: Pengungkapan ESG Pilar Governance berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Simultan terhadap Agresivitas Pajak

Dimensi sosial dan *governance* diduga bekerja bersama karakteristik fundamental perusahaan dalam membentuk perilaku fiskal. Gunadi et al. (2025) menemukan profitabilitas sebagai pendorong signifikan agresivitas pajak pada perusahaan Indonesia, sejalan dengan temuan Mao & Wu (2019) bahwa profitabilitas memediasi hubungan CSR dan penghindaran pajak ((Gunadi et al., 2025; Mao & Wu, 2019). Berdasarkan uraian tersebut:

H3: Pengungkapan ESG Pilar Sosial, ESG Pilar Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Dummy Sektor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan desain riset kuantitatif, data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung dari otoritas pasar modal (Bursa Efek Indonesia/BEI) serta laman resmi dari perusahaan yang bersangkutan. Adapun *horizon* waktu pengamatan mencakup rentang tiga periode pembukuan, mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Penentuan sampel akhir menetapkan 10 entitas bisnis yang tergolong dalam jajaran *Top 10 Constituents* pada Indeks *IDX ESG Leaders*. Sementara itu, evaluasi terhadap performa ESG beserta peninjauan aspek kontroversinya merujuk pada basis data yang dirilis oleh *Sustainalytics*.

Pemilihan Top 10 Constituents IDX ESG Leaders

Kriteria umum seleksi berdasarkan Panduan dan Metodologi Indeks *IDX ESG Leaders* sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Umum Seleksi Indeks IDX ESG Leaders

Semesta (<i>Universe</i>)	Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota indeks IDX80 serta telah mengantongi penilaian risiko ESG dari lembaga <i>Sustainalytics</i>
Kriteria Seleksi	- Melakukan eliminasi terhadap emiten yang memiliki kegiatan operasional utama di sektor kemasyarakatan dan industri sensitif, meliputi: - Produksi Batubara tambang dan produksi batu bara. - Kegiatan distribusi komoditas batu bara. - Sektor hulu migas (eksplorasi, produksi, dan penyulingan minyak & gas). - Kegiatan operasional di bidang hilir minyak dan gas bumi, yang mencakup aspek pergudangan, penyimpanan, hingga jalur distribusinya. - Sektor manufaktur yang memproduksi minuman keras atau beralkohol. - Manufaktur produk tembakau atau rokok. - Industri manufaktur alat utama sistem persenjataan. - Mengeksklusi perusahaan publik yang terindikasi memiliki rekam jejak kontroversi pada level kategori 4 maupun kategori 5. - Mengeliminasi emiten dengan tingkat risiko tata kelola, sosial, dan lingkungan (<i>ESG risk rating</i>) yang berada pada kategori tinggi (<i>high</i>) maupun sangat berat (<i>severe</i>). - Melakukan pemeringkatan terhadap sisa entitas dalam semesta data, di mana prioritas pemilihan didasarkan pada tingkat risiko ESG terendah.

Proses Pemilihan Konstituen

1. Evaluasi Isu Kontroversi dan Risiko ESG oleh *Sustainalytics*

Dalam memfasilitasi ketersediaan data ESG, BEI mengintegrasikan basis datanya dengan *Sustainalytics*, sebuah lembaga independen otoritatif yang berfokus pada riset *corporate governance* dan komitmen ESG global. *Output* data yang disediakan mencakup kalkulasi tingkat risiko serta penelaahan aspek kontroversial korporasi, yang mendasari penyeleksian konstituen pada Indeks *IDX ESG Leaders*. Eksplorasi mendalam mengenai metodologi penilaian ini dapat diakses secara terbuka via laman resmi www.sustainalytics.com. Proses evaluasi risiko ini dijadwalkan secara berkala oleh *Sustainalytics* untuk pembaharuan indeks setiap periode Februari–Maret serta Agustus–September.

2. Mekanisme Penetapan Sampel Akhir

Prosedur penyaringan terhadap populasi saham acuan dijalankan mengacu pada skor penilaian risiko (*ESG risk rating*) dan riwayat kontroversi perusahaan yang dipublikasikan oleh lembaga *Sustainalytics*. Adapun detail langkah penentuannya dirinci sebagai berikut:

- a. Penerapan Kriteria Eksklusi (*Exclusionary Screening*): Mengeliminasi emiten yang memiliki eksposur operasional pada sektor-sektor industri sensitif di bawah ini:
 - 1) Eksploitasi dan komoditas batu bara (produksi).
 - 2) Aktivitas distribusi logistik batu bara.
 - 3) Sektor hulu minyak dan gas (ekstraksi & pemurnian).
 - 4) Sektor hilir minyak dan gas (pergudangan & distribusi).
 - 5) Industri pembuatan produk minuman keras.
 - 6) Industri pengolahan komoditas tembakau dan rokok.
 - 7) Manufaktur perlengkapan persenjataan.
 - 8) Aktivitas komersial di bidang perjudian.
 - 9) Industri yang bergerak di sektor pornografi.
 - 10) Pengembangan energi/teknologi nuklir.
- b. Penyaringan Isu Kontroversial: Mengeluarkan emiten yang terbukti masuk dalam klasifikasi kontroversi tingkat skala 4 dan skala 5.
- c. Batas Toleransi Risiko ESG: Mengeliminasi saham dari entitas bisnis yang mencatatkan profil risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tergolong dalam level tinggi (*high*) ataupun sangat berat (*severe*).
- d. Formasi Sampel Akhir: Memilih konstituen *IDX ESG Leaders* dari sisa populasi saham yang tersedia dengan menyortirnya dari nilai risiko paling minimum. Batasan kuota konstituen yang ditetapkan adalah berkisar antara 15 hingga maksimal 30 saham pengendali.

Perhitungan Indeks

Perhitungan indeks *IDX ESG Leaders* mengadopsi pendekatan *Capped Free Float Market Capitalization Weighted Average and ESG Tilt Factored*. Melalui kerangka ini, penentuan bobot tidak semata-mata mengacu pada nilai kapitalisasi pasar *free float*, melainkan turut mengintegrasikan variabel performa ESG. Di samping itu, guna meminimalkan dominasi saham tertentu, batas maksimal bobot (*capping*) bagi setiap konstituen dibatasi secara ketat tertinggi sebesar 15%. Operasionalisasi faktor ESG tersebut diproksikan melalui *ESG tilt factor*, sebuah nilai yang diperoleh dari hasil transformasi skor risiko ESG ke dalam formulasi *z-score* (PT Bursa Efek Indonesia, 2026). Konstituen yang termasuk dalam *Top 10 Constituents* Indeks *IDX ESG Leaders* ditetapkan sebagai populasi target dalam studi ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Perhitungan Indeks IDX ESG Leaders

No	Code	Company Name	Sector
1	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Financials
2	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Financials
3	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	Financials
4	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Infrastructures
5	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	Technology
6	GOTO	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	Technology
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Financials
8	PGEO	Pertamina Geothermal Energy Tbk.	Infrastructures
9	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Infrastructures
10	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	Energy

Secara singkat, kriteria pemilihan populasi yang kami lakukan:

1. Termasuk dalam *Top 10 Constituents IDX ESG Leaders*.
2. Memiliki laporan keuangan audited tahun 2023, 2024, dan 2025 secara lengkap
3. Memiliki *Sustainability Report* tahun 2023, 2024, dan 2025 secara lengkap.
4. Tidak memiliki data *extreme outlier*

Berdasarkan kriteria dan metodologi di atas, maka *Top 10 Constituents* menurut *IDX ESG Leaders* yang digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 3 Top 10 Constituents menurut IDX ESG Leaders

No	Code	Company Name	Tahun Penelitian
1	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2023, 2024, 2025
2	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2023, 2024, 2025
3	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	2023, 2024, 2025
4	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	2023, 2024, 2025
5	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	2024, 2025
6	GOTO	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	2024
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2023, 2024, 2025
8	PGEO	Pertamina Geothermal Energy Tbk.	2023, 2024, 2025
9	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	2023, 2024, 2025
10	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2023, 2024, 2025

Dengan demikian, total data panel pengamatan yang dianalisis adalah 27 data pengamatan.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). *Effective Tax Rate* (ETR) atau Tarif Pajak Efektif adalah persentase pajak penghasilan riil yang sebenarnya dibayarkan oleh sebuah perusahaan (atau individu) dari total laba komersial sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Pajak kini} + \text{Pajak tangguhan}}{\text{Laba komersial sebelum pajak}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Model penelitian ini mengintegrasikan beberapa variabel independen, yang terdiri atas:

a. ESG Pilar Governance

Diukur menggunakan analisis konten dengan menjumlahkan pengungkapan kluster GRI 2-9 s.d 2-21 (Tata Kelola Internal), GRI 2-27 (Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan), GRI 205 (Anti-Korupsi), GRI 206 (Anti-Monopoli), GRI 207 (Pajak) yang disajikan dalam *Sustainability Report*. ESG Pilar Governance dihitung dengan cara memberi nilai 1 untuk item GRI Governance yang diungkapkan dan 0 apabila item GRI tersebut tidak diungkapkan atau informasi disembunyikan/*omission* karena batasan kerahasiaan perusahaan. Total nilai tsb dibagi dengan 21 (jumlah total item yang diungkapkan).

$$ESG \text{ Pilar Governance} = \frac{\text{Jumlah Nilai Pengungkapan ESG Pilar Governance}}{21}$$

b. ESG Pilar Sosial

Kalkulasi Indeks ESG Pilar Sosial pada studi ini dioperasionalkan lewat pendekatan analisis konten (*content analysis*) yang bersumber pada struktur Indeks Konten GRI di dalam laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Tolak ukur yang diaplikasikan mengombinasikan standar internasional murni—khususnya pilar utama GRI 400—serta serangkaian indikator kustomisasi domestik (meliputi GRI 401-4, GRI 404-4, dan GRI 413-3). Penyesuaian indikator lokal tersebut diadopsi oleh emiten guna menjamin keselarasan pelaporan keberlanjutan dengan amanat regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017. ESG Pilar Sosial dihitung dengan cara memberi nilai 1 untuk item GRI Sosial yang diungkapkan dan 0 apabila item GRI tersebut tidak diungkapkan atau informasi disembunyikan/*omission* karena batasan kerahasiaan perusahaan. Total nilai tersebut dibagi dengan 39 (jumlah total item yang diungkapkan).

$$ESG \text{ Pilar Sosial} = \frac{\text{Jumlah Nilai Pengungkapan ESG Pilar Sosial}}{39}$$

3. Variabel Kontrol

Guna meminimalisasi bias estimasi, studi ini mengintegrasikan sejumlah variabel kontrol yang diuraikan sebagai berikut:

a. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Variabel ukuran perusahaan (*firm size*) melalui nilai logaritma natural (ln) dari total aset yang dimiliki oleh entitas terkait. Bagi emiten yang menyajikan laporan keuangan dalam denominasi valuta asing, nilai total aset terlebih dahulu dikonversi ke satuan Rupiah (IDR). Proses penyetaraan nilai ini memanfaatkan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JISDOR) yang berlaku pada tanggal pelaporan atau akhir periode pembukuan.

$$SIZE = \ln \ln (total\ asset)$$

b. Profitabilitas

Variabel profitabilitas adalah rasio *Return on Assets* (ROA). Apabila terdapat emiten sampel yang memublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing, maka komponen laba bersih pasca-pajak beserta total asetnya akan dikonversi terlebih dahulu ke mata uang Rupiah (IDR). Proses penyetaraan nilai ini mengacu pada kurs referensi JISDOR yang berlaku pada tanggal penutupan periode pelaporan keuangan

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Asset}$$

c. Dummy Sektor

Variabel *dummy* sektor diimplementasikan sebagai parameter dikotomi dengan menetapkan representasi angka 1 dan 0. Kode 1 diperuntukkan bagi kelompok entitas yang bergerak di industri perbankan, sedangkan kode 0 dialokasikan untuk entitas di luar sektor perbankan (non-perbankan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diterapkan guna menguraikan karakteristik mendasar serta sebaran data dari seluruh variabel yang diteliti. Parameter yang disajikan dalam ringkasan ini mencakup kalkulasi nilai rerata (*mean*), deviasi standar, serta nilai ekstrem terendah (minimum) dan tertinggi (maksimum). Ringkasan hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	27	-.04	.37	.2056	.08586
ROA	27	-.13	.15	.0426	.04646
Size	27	24.55	35.58	32.7389	3.23300
ESG_Sosial	27	.41	1.00	.6789	.19230
ESG_Governance	27	.67	1.00	.8970	.08730
Valid N (listwise)	27				

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS, 2026

Merujuk pada *output* statistik deskriptif, variabel agresivitas pajak mencatatkan nilai rerata (*mean*) sebesar 0,2056 dan standar deviasi 0,08586. Rentang data bergerak dari titik terendah pada angka -0,04 hingga capaian tertinggi sebesar 0,37. Distribusi angka ini mencerminkan adanya keberagaman tingkat agresivitas penghematan pajak di antara entitas bisnis yang diobservasi.

Pada variabel transparansi ESG pilar tata kelola (*governance*), diperoleh nilai rata-rata kelompok sebesar 0,8970 disertai deviasi standar bernilai 0,08730. Nilai minimum yang terdeteksi

berada di level 0,67 dan nilai maksimum menyentuh angka sempurna 1,00. Konfigurasi data ini memberikan indikasi awal bahwa mayoritas emiten sampel secara umum telah menerapkan keterbukaan informasi tata kelola yang cukup komprehensif.

Sementara itu, pelaporan pilar sosial ESG memperlihatkan angka *mean* sebesar 0,6789 dengan ukuran penyebaran (standar deviasi) sebesar 0,19230. Batas bawah data tercatat pada skor 0,41 dan batas atasnya berada pada level 1,00. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa tingkat transparansi isu sosial pada sampel penelitian memiliki fluktuasi atau tingkat keragaman yang lebih lebar ketimbang dimensi tata kelolanya.

Terkait variabel kontrol ukuran perusahaan (*firm size*), perhitungan menghasilkan nilai tengah rata-rata sebesar 32,7389 dan deviasi standar sebesar 3,23300. Nilai terkecil berada di angka 24,55, sedangkan nilai terbesar mencapai 35,58. Disparitas nilai ekstrem ini mengonfirmasi adanya perbedaan skala aset yang signifikan antar perusahaan di dalam kelompok sampel.

Terakhir, profitabilitas selaku variabel kontrol tambahan menunjukkan nilai rata-rata performa sebesar 0,0426 dengan standar deviasi 0,04646. Sektor ini merekam nilai paling rendah pada level -0,13 serta nilai optimal sebesar 0,15. Keragaman data ini mencerminkan kondisi rentabilitas emiten yang bervariasi, termasuk potret beberapa perusahaan yang terindikasi membukukan kerugian atau laba negatif sepanjang lini masa pengamatan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 5 Uji Normalitas

Table 8.9. Normality						
Descriptives						
		Statistic		Std. Error		
Standardized Residual	Mean	.0000000		.17295817		
	95% CI for Mean - Lower Bound	-.3555206				
	95% CI for Mean - Upper Bound	.3555206				
	5% Trimmed Mean	.0222287				
	Median	.0776171				
	Variance	.808				
	Std. Deviation	.89871703				
	Minimum	-2.47679				
	Maximum	2.15602				
	Range	4.63281				
	Interquartile Range	.81647				
	Skewness	-.571		.448		
	Kurtosis	2.110		.872		
	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
Standardized Residual	.141	27	.183	.941	27	.132

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS, 2026

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,183 untuk uji Kolmogorov-Smirnov dan 0,132 untuk uji Shapiro-Wilk. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi ini memiliki sebaran yang normal. Dengan terpenuhinya

prasyarat normalitas ini, model regresi dinyatakan valid untuk diaplikasikan pada prosedur analisis statistik berikut

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	-.058	.293		-.197	.846		
ESG_Sosial	-.139	.106	-.312	-1.320	.201	.433	2.312
ESG_Governance	.645	.231	.656	2.789	.011	.438	2.286
ROA	.632	.319	.342	1.984	.060	.812	1.231
Size	-.007	.006	-.282	-1.231	.232	.461	2.170
Dummy_Sektor	-.005	.045	-.030	-.112	.912	.337	2.970

a. *Dependent Variable:* ETR

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS , 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen yang terdiri atas pengungkapan ESG pilar sosial, pengungkapan ESG pilar tata kelola (*governance*), serta variabel kontrol menunjukkan nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas sehingga memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 7 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.702 ^a	.493	.372	.06805	3.110

a. *Predictors:* (Constant), *Dummy_Sektor*, *ESG_Governance*, *ROA*, *Size*, *ESG_Sosial*

b. *Dependent Variable:* ETR

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS, 2026

Berdasarkan evaluasi autokorelasi, tercatat nilai statistik sebesar 3,110 yang secara signifikan berada di atas angka 2. Fenomena ini mengonfirmasi adanya kecenderungan autokorelasi negatif pada model linier yang dibangun. Gejala statistika ini disinyalir bersumber dari sifat data penelitian, seperti penerapan struktur data panel sederhana dengan rentang waktu observasi yang relatif terbatas (2023–2025), kuantitas sampel yang minim, serta kemungkinan adanya kontribusi dari variabel independen lain di luar model riset dalam mempengaruhi fluktuasi *Effective Tax Rate* (ETR).

Meskipun demikian, mengacu pada pendapat Gujarati (2012), pengujian autokorelasi pada penelitian yang menggunakan data *cross-sectional* tidak merupakan perhatian utama karena asumsi independensi residual umumnya lebih relevan pada data *time series*. Oleh sebab itu, indikasi autokorelasi dalam penelitian ini tidak menjadi dasar untuk menolak kelayakan model regresi dan tidak mempengaruhi kelanjutan analisis hipotesis (Gujarati, 2012).

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t
				Sig.

(Constant)	.048	.183		.261	.797
ESG_Sosial	.030	.066	.132	.455	.654
ESG_Governance	-.152	.144	-.304	-1.056	.303
ROA	-.071	.198	-.076	-.358	.724
Size	.004	.004	.293	1.043	.309
Dummy_Sektor	-.036	.028	-.414	-1.263	.220

a. *Dependent Variable: ABS_RES*

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS, 2026

Pemenuhan asumsi homokedastisitas pada model regresi dibuktikan oleh hasil uji heteroskedastisitas yang menunjukkan nilai probabilitas seluruh variabel berada di atas ambang 0,05. Rincian nilai signifikansi tiap-tiap variabel penjelas mencakup pengungkapan ESG dimensi sosial (0,654), aspek tata kelola (0,303), serta barisan variabel kontrol berupa profitabilitas atau ROA (0,704), skala korporasi atau *size* (0,309), dan indikator *dummy* sektor (0,220). Karakteristik data yang menunjukkan varians residual yang konstan ini menandakan absennya masalah heteroskedastisitas dalam pemodelan yang dibangun.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.702 ^a	.493	.372	.06805	3.110

a. *Predictors: (Constant), Dummy_Sektor, ESG_Governance, ROA, Size, ESG_Sosial*

b. *Dependent Variable: ETR*

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS, 2026

Melalui estimasi koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,372. Angka ini merepresentasikan bahwa kombinasi variabel independen yang mencakup transparansi ESG dimensi sosial dan tata kelola—beserta variabel kontrol (skala perusahaan, profitabilitas, serta indikator *dummy* sektor) memiliki daya penjelas sebesar 37,2% terhadap variabilitas agresivitas pajak selaku variabel terikat. Di sisi lain, porsi mayoritas sebesar 62,8% dipengaruhi oleh kontribusi faktor eksternal di luar kerangka pemodelan yang tidak dianalisis dalam studi ini.

Regresi Linear Berganda

Tabel 10 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	-.058	.293		-.197	.846		
ESG_Sosial	-.139	.106	-.312	-1.320	.201	.433	2.312
ESG_Governance	.645	.231	.656	2.789	.011	.438	2.286
ROA	.632	.319	.342	1.984	.060	.812	1.231
Size	-.007	.006	-.282	-1.231	.232	.461	2.170
Dummy_Sektor	-.005	.045	-.030	-.112	.912	.337	2.970

a. *Dependent Variable: ETR*

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS , 2026

Berdasarkan hasil estimasi model, diperoleh rumusan regresi linear berikut:

$$Y = -0,058 - 0,139X_1 + 0,645X_2 + 0,632X_3 - 0,007X_4 - 0,005X_5 + e$$

Model tersebut merefleksikan kontribusi serta arah hubungan dari seluruh variabel penjelas (independen dan kontrol) terhadap variabel dependen agresivitas pajak yang diproksikan lewat *Effective Tax Rate* (ETR). Interpretasi lebih lanjut mengenai nilai koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nilai konstanta sebesar -0,058 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dan variabel kontrol diasumsikan bernilai nol, maka nilai ETR diperkirakan sebesar -0,058.
2. Koefisien regresi pengungkapan ESG pilar sosial (X_1) sebesar -0,139 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada skor pengungkapan ESG pilar sosial, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*), akan diikuti oleh penurunan nilai ETR sebesar 0,139.
3. Koefisien regresi pengungkapan ESG pilar tata kelola (*governance*) (X_2) sebesar 0,645 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada skor pengungkapan ESG pilar tata kelola akan meningkatkan nilai ETR sebesar 0,645, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Variabel profitabilitas (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,632. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada tingkat profitabilitas akan diikuti dengan peningkatan nilai ETR sebesar 0,632, dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan.
5. Koefisien regresi ukuran perusahaan (*size*) (X_4) sebesar -0,007 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan ukuran perusahaan diperkirakan akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,007, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
6. Variabel *dummy* sektor (X_5) memiliki koefisien regresi sebesar -0,005. Artinya, perubahan kategori sektor usaha sebagaimana didefinisikan dalam variabel *dummy* diperkirakan menurunkan nilai ETR sebesar 0,005, dengan asumsi variabel lain dalam model tetap konstan.

Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian secara parsial dilakukan melalui uji t untuk mengestimasi dampak dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Prosedur ini bertujuan untuk mengidentifikasi signifikansi pengaruh individual dari tiap variabel independen terhadap tingkat agresivitas pajak, dengan tetap mengontrol keberadaan variabel lainnya di dalam model estimasi. Rangkuman luaran dari uji t tersebut dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	-.058	.293		-.197	.846		
ESG_Sosial	-.139	.106	-.312	-1.320	.201	.433	2.312
ESG_Governance	.645	.231	.656	2.789	.011	.438	2.286
ROA	.632	.319	.342	1.984	.060	.812	1.231
Size	-.007	.006	-.282	-1.231	.232	.461	2.170
Dummy_Sektor	-.005	.045	-.030	-.112	.912	.337	2.970

a. *Dependent Variable: ETR*

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), pengaruh masing-masing variabel independen terhadap agresivitas pajak dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H_1)
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengungkapan ESG pilar sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,201, yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) tidak diterima. Variabel ini memiliki koefisien regresi sebesar -0,139, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, pengungkapan ESG pilar sosial tidak terbukti mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian.
2. Hipotesis kedua (H_2)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengungkapan ESG pilar tata kelola (*governance*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011, yang mana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,645 menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan ESG pilar tata kelola diikuti dengan peningkatan nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Mengingat ETR merupakan proksi agresivitas pajak yang memiliki hubungan berlawanan arah, peningkatan ETR mengindikasikan penurunan agresivitas pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan ESG pilar tata kelola, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak.

Uji F

Pengujian secara simultan diakomodasi melalui uji F guna mengidentifikasi apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh kolektif terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, uji tersebut diorientasikan untuk menguji signifikansi dampak bersama dari pengungkapan ESG pilar sosial, pengungkapan ESG pilar tata kelola, beserta variabel kontrol meliputi ukuran perusahaan (*size*), profitabilitas (ROA), dan *dummy* sektor terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Luaran empiris dari uji F ini dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 12 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.094	5	.019	4.078	.010 ^b
Residual	.097	21	.005		
Total	.192	26			

a. *Dependent Variable: ETR*

b. *Predictors: (Constant), Dummy_Sektor, ESG_Governance, ROA, Size, ESG_Sosial*

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik dengan SPSS, 2026

Merujuk pada hasil uji F, nilai F hitung yang diperoleh adalah 4,078 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,010. Karena nilai signifikansi ini berada di bawah ambang batas 0,05, maka hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima. Temuan ini mengonfirmasi bahwa variabel pengungkapan ESG pilar sosial dan pilar tata kelola (*governance*), dikombinasikan dengan variabel kontrol—meliputi ukuran perusahaan (*size*), profitabilitas (ROA), serta *dummy* sektor—secara serempak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang diestimasi memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi tingkat agresivitas pajak pada sampel perusahaan yang diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, pembahasan mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap agresivitas pajak diuraikan sebagai berikut.

Pengaruh ESG Pilar Sosial terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian pada hipotesis pertama (H_1) diorientasikan untuk membuktikan dugaan dampak negatif pengungkapan ESG pilar sosial terhadap agresivitas pajak. Kendati demikian, hasil estimasi uji t mencatat nilai statistik sebesar -1,320 dengan probabilitas signifikansi di angka 0,201. Mengingat nilai signifikansi ini melampaui standar $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi aspek sosial dalam ESG tidak mengintervensi tingkat agresivitas pajak secara signifikan, sehingga H_1 dinyatakan ditolak.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan aspek sosial belum tentu diikuti oleh perubahan dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Aktivitas sosial yang diungkapkan perusahaan cenderung berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tanpa secara langsung memengaruhi keputusan strategis terkait pengelolaan pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi melalui pengungkapan aktivitas sosial sebagai bentuk

pemenuhan ekspektasi masyarakat. Dalam konteks ini, pengungkapan pilar sosial lebih berorientasi pada pembentukan citra perusahaan dibandingkan sebagai faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan (Aini & Ambarita, 2026). Selain itu, perusahaan juga dimungkinkan memanfaatkan reputasi sosial yang baik untuk mengurangi perhatian publik terhadap praktik perencanaan pajak yang dilakukan (Firmansyah et al., 2025).

Catatan empiris dalam studi ini juga memperkuat temuan terdahulu dari (Aini & Ambarita, 2026; Kurniawan, 2024; Makhfudloh et al., 2018), yang secara seragam menyimpulkan nihilnya pengaruh signifikan dari pengungkapan ESG pilar sosial terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh ESG Pilar Tata Kelola terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian pada hipotesis kedua (H_2) menduga bahwa pengungkapan ESG pilar tata kelola (*governance*) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan *output* uji t, ditemukan nilai statistik sebesar 2,789 dengan probabilitas signifikansi di angka 0,011. Karena nilai signifikansi ini berada di bawah ambang batas 0,05, maka kesimpulan statistik mendukung digunakannya H_2 .

Perolehan koefisien regresi yang menunjukkan arah positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) mengonfirmasi bahwa perluasan pengungkapan pilar tata kelola ESG berbanding lurus dengan peningkatan nilai ETR. Mengingat karakteristik ETR sebagai indikator yang memiliki hubungan asimetris (berkebalikan) dengan agresivitas pajak, maka kenaikan nilai ETR merefleksikan kecenderungan entitas untuk menekan perilaku agresivitas pajaknya. Dengan kata lain, semakin transparan dan akuntabel tata kelola yang dipublikasikan oleh korporasi, maka tingkat kepatuhan perusahaan dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya dinilai kian optimal.

Fenomena empiris ini memperkuat argumentasi teori legitimasi yang memaparkan orientasi korporasi dalam mempertahankan pengakuan sosial di mata publik melalui implementasi tata kelola yang kredibel, termasuk di dalamnya aspek pemenuhan pajak secara bertanggung jawab. Pengadopsian mekanisme tata kelola yang baik menjadi instrumen strategis bagi entitas bisnis untuk merawat kepercayaan publik sekaligus mengonstruksi hubungan jangka panjang yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan (Gunadi et al., 2025). Oleh sebab itu, perusahaan dengan pengungkapan tata kelola yang komprehensif cenderung mengadopsi kebijakan perpajakan yang lebih hati-hati (konservatif) dan tidak agresif (Sari & Machmuddah, 2026).

Temuan dalam studi ini selaras dengan observasi empiris dari (Dinarjito, 2026; Gunadi et al., 2025; Sari & Machmuddah, 2026)) Riset-riset tersebut mendokumentasikan bahwa pengungkapan ESG pilar tata kelola memberikan dampak positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang secara tidak langsung mengindikasikan adanya pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak.

Di samping mengevaluasi prediktor utama, pengujian ini turut mengintegrasikan profitabilitas, skala perusahaan, serta variabel *dummy* sektor sebagai instrumen kontrol di dalam model. Hasil uji statistik t untuk variabel profitabilitas yang direpresentasikan oleh nilai *Return on Assets* (ROA) mencatat koefisien sebesar 1,984 dengan probabilitas signifikansi di angka 0,060. Oleh karena tingkat signifikansi ini melampaui kriteria pengujian 0,05, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mengintervensi agresivitas pajak secara signifikan. Catatan ini mengonfirmasi hasil studi terdahulu (Ardyansah & Zulaikha, 2014; Febriany & Syarif, 2025).

Selanjutnya, ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma total aset juga terbukti tidak memiliki kontribusi signifikan dalam memengaruhi agresivitas perpajakan. Melalui estimasi statistik uji t, diperoleh nilai -1,231 dengan p-value sebesar 0,232. Bukti empiris ini sejalan dengan argumentasi Austin dan Kezia (2026) yang menyatakan bahwa homogenitas karakteristik skala perusahaan di dalam sampel menyebabkan variasi total aset tidak memicu perbedaan kebijakan perpajakan yang material.

Sementara itu, hasil komputasi untuk variabel *dummy* sektor mencetak nilai statistik sebesar -0,112 dengan signifikansi di tingkat 0,912. Angka tersebut memberikan petunjuk bahwa tipologi sektor usaha tidak memberikan dampak yang nyata terhadap praktik agresivitas pajak pada jajaran perusahaan yang menjadi subjek observasi.

Pengaruh ESG Pilar Sosial, ESG Pilar Tata Kelola, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Dummy Sektor terhadap Agresivitas Pajak

Formulasi hipotesis ketiga (H_3) memproyeksikan adanya pengaruh simultan dari pengungkapan ESG pilar sosial, pengungkapan ESG pilar tata kelola, profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (*size*),

serta *dummy* sektor terhadap tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan pengujian F, tercatat nilai F hitung sebesar 4,078 dengan tingkat signifikansi 0,010. Dikarenakan nilai probabilitas tersebut di bawah ambang batas 0,05, maka H_3 secara resmi dinyatakan diterima.

Hasil pengujian ini mengonfirmasi bahwa kendati tidak seluruh variabel menunjukkan pengaruh signifikan secara individual (parsial), kombinasi seluruh variabel di dalam model ini secara kolektif mampu merefleksikan variabilitas perilaku agresivitas pajak korporasi. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan pajak perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan diintervensi oleh sinergi berbagai faktor eksternal berupa komitmen keberlanjutan sekaligus karakteristik internal keuangan entitas.

Secara teoritis, temuan empiris ini memperkuat *Stakeholder Theory*, yang menggarisbawahi urgensi bagi perusahaan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan melalui implementasi operasional bisnis yang akuntabel. Pada jajaran emiten yang terdaftar dalam IDX ESG Leaders, diskresi terkait aspek perpajakan tidak semata-mata didorong oleh kepatuhan tata kelola dan tanggung jawab sosial, melainkan turut mengintegrasikan kapasitas profitabilitas, skala bisnis, dan tipologi sektor usaha. Konsekuensinya, tingkat agresivitas pajak merepresentasikan output interaksi multiaspek yang saling mengonfirmasi dalam menjaga keberlangsungan jangka panjang korporasi sekaligus memelihara reputasi di mata *stakeholders*.

KESIMPULAN

Studi ini diakumulasikan untuk menganalisis dampak pilar sosial dan pilar tata kelola dalam ESG terhadap tingkat agresivitas pajak, dengan mengontrol faktor profitabilitas, skala perusahaan, serta *dummy* sektor. Temuan empiris mengindikasikan bahwa dimensi sosial ESG tidak menunjukkan dampak yang berarti terhadap tindakan agresivitas pajak. Sebaliknya, penguatan pada pilar tata kelola terbukti menekan agresivitas pajak secara signifikan. Fenomena ini tercermin dari peningkatan nilai ETR, yang menegaskan bahwa entitas dengan tata kelola yang kredibel menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih superior. Sementara itu, seluruh variabel kontrol yang digunakan tidak memperlihatkan pengaruh secara parsial. Namun, jika diuji secara simultan, kombinasi pilar sosial, pilar tata kelola, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *dummy* sektor berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil tersebut, agenda riset mendatang disarankan untuk mengintegrasikan variabel independen baru yang tidak terjamah dalam model ini, memodifikasi proksi pengukuran pada tiap variabel, atau memperpanjang cakupan tahun pengamatan. Di samping itu, perluasan jumlah sampel sangat dianjurkan guna memfasilitasi analisis komparatif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, L., & Ambarita, D. (2026). Pengaruh Esg (Environmental, Social And Governance), Beban Utang Dan Kinerja Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 3(1), 60–80. <https://doi.org/10.62237/JNA.V3I1.348>
- Ardyansah, D., & Zulaikha, Z. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2010-2012)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Austin, I., & Kezia Josephine. (2026). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Perencanaan Pajak. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(2), 1435–1450. <https://doi.org/10.62710/ty4jpa13>
- Deegan, C. (2006). Financial Accounting Theory. In *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Education. https://books.google.com/books/about/Financial_Accounting_Theory.html?hl=id&id=_hwSs8X X5YYC
- Dinarjito, A. (2026). ESG and tax avoidance relationship: A systemic literature review. *Educoretax*, 6(4), 183–201. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v6i4.2085>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.

- Febriany, A., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Barang Konsumen Primer. *ECo-Buss*, 8(1), 167–178. <https://doi.org/10.32877/eb.v8i1.2450>
- Firmansyah, A., Pratama, H. P., & Valensa, M. F. (2025). Esg Risk And Tax Avoidance: Signaling Insights From Indonesian Public Firms. *EDUCORETAX: WIM Solusi Prima*, 5(3), 370–380.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Freeman, R. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. In *The Blackwell Handbook of Strategic Management* (pp. 183–201). Wiley. <https://doi.org/10.1111/b.9780631218616.2006.00007.x>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2022). Teori Akuntansi. In *PENERBIT UNDIP*. PENERBIT UNDIP.
- Gujarati, D. N. (2012). *Basic Econometrics 4th ed*. McGraw-Hill Irwin.
- Gunadi, M. T., Ardiana, P. A., Dewa, I., Badera, N., & Noviani, N. (2025). ESG Performance and Corporate Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesian Listed Firms. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 293–304. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2025.V20.I01.P07>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.
- Kurniawan, M. P. (2024). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance terhadap Agresivitas Pajak dengan. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap perencanaan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48.
- Mao, C.-W., & Wu, W.-C. (2019). Moderated mediation effects of corporate social responsibility performance on tax avoidance: evidence from China. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 26(1–2), 90–107. <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1546157>
- Sari, P. A. D., & Machmuddah, Z. (2026). The Effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure on Tax Avoidance: Firm Size as a Moderating Variable. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 11(1), 158–169. <https://doi.org/10.30871/JAAT.V11I1.12086>
- Wibawa, I. D. P. S. (2025). *Momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk patuh membayar pajak | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/momentum-hari-kebangkitan-nasional-untuk-patuh-membayar-pajak>